

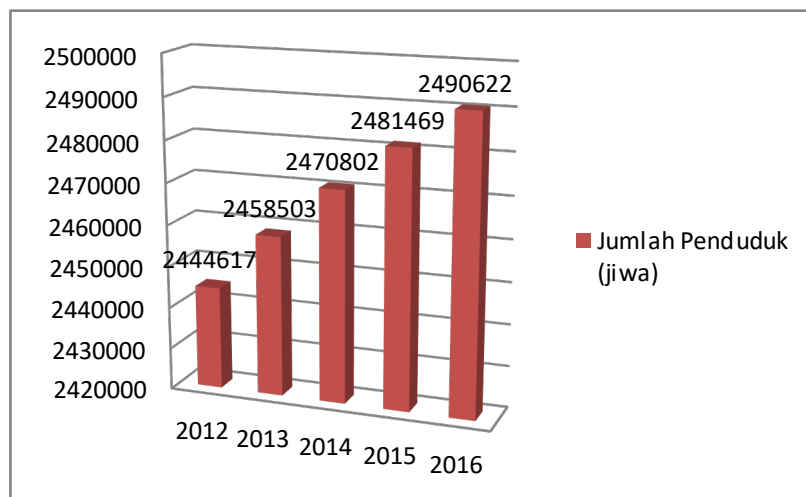
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Menurut data Badan Pusat Statistik (2014) dan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2015) menyatakan bahwa proyeksi jumlah penduduk di Pulau Jawa paling besar di Jawa Barat sebesar 4.670.960.000 penduduk, Jawa Timur sebesar 3.884.760.000 penduduk, Jawa Tengah sebesar 3.377.410.000 penduduk, Banten sebesar 1.195.520.000, DKI Jakarta sebesar 1.017.790.000 penduduk dan DI Yogyakarta 367.920.000 penduduk.

Kota Bandung yang terletak di Pulau Jawa yang tepatnya di Jawa Barat, dengan luas wilayah sebesar 16.729.65 Ha, Kota Bandung memiliki 30 kecamatan dan 151 kelurahan. Jumlah penduduk terakhir yang tercatat pada tahun 2016 adalah sebanyak 2.490.622 jiwa dengan komposisi penduduk laki laki sebanyak 1.257.176 jiwa dan komposisi penduduk perempuan sebanyak 1.233.446 jiwa. (BPS ,2014).



Gambar 1.1 Grafik Jumlah Penduduk Kota Bandung Tahun 2012-2016

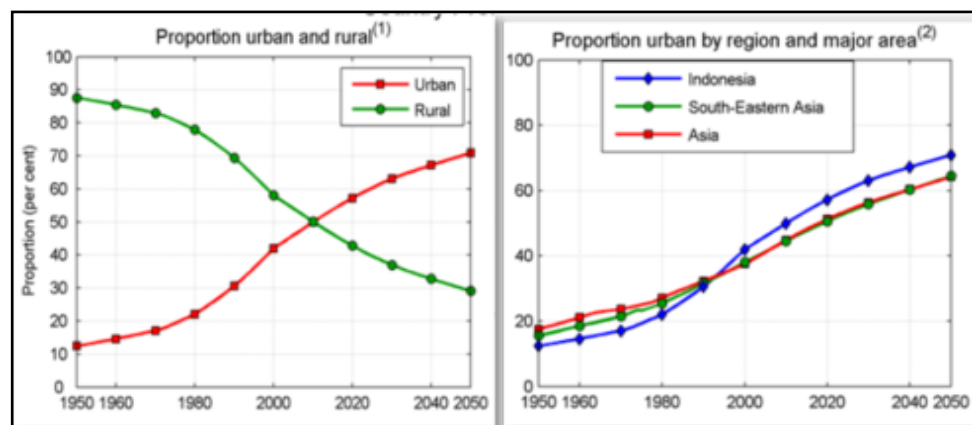
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bandung, 2016

Kota Bandung merupakan salah satu kota dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Berdasarkan Gambar 1.2 mengenai jumlah penduduk Kota Bandung tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, angka ini akan terus meningkat setiap

tahunnya. Pada tahun 2016 tercatat sebanyak 2.490.622 jiwa penduduk dengan komposisi 1.257.176 jiwa penduduk pria dan 1.233.446 jiwa penduduk wanita. Tingkat laju pertumbuhan penduduk yang tercatat adalah sebesar 0,37 persen per tahun (Badan Pusat Statistik Kota Bandung, 2016). Kota Bandung adalah salah satu kota terbesar di Indonesia setelah DKI Jakarta dan Kota Surabaya yang memiliki penduduk dibawah usia 40 tahun diatas 60 persen.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan teknologi di dunia telah menyebar dengan cepat, banyak manfaat yang telah diberikan dengan perkembangan teknologi ini. Menurut World Bank (2016) Perkembangan teknologi telah mendorong pertumbuhan, memperluas kesempatan dan meningkatkan penyampaian sebuah layanan. Perkembangan teknologi ini berdampak juga kepada pribadi-pribadi yang merasakannya seperti, komunikasi dan informasi yang lebih mudah, kenyamanan yang lebih besar yang menciptakan rasa sosial yang mendalam. Populasi manusia di dunia semakin meningkat dari tahun ke tahun, menurut PBB jumlah penduduk di dunia akan mencapai 9,5 milyar pada tahun 2050 dan hampir 70% akan tinggal di kota (United Nations, 2014).



Gambar 1.2 Profil Urbanisasi di Indonesia

Sumber : Department of Economic and Social Affairs, 2014

United Nations (Department of Economic and Social Affairs, 2014) menyatakan terjadi kenaikan jumlah penduduk yang melakukan urbanisasi di Indonesia dan jumlah tersebut akan semakin meningkat. Gambar 1.2 menunjukkan proporsi urbanisasi yang terjadi di Indonesia. Perpindahan orang menuju kota telah

melebihi perpindahan manusia menuju desa. Grafik tersebut juga menunjukkan *trend* tingkat urbanisasi di Indonesia telah melebihi tingkat urbanisasi yang terjadi di area Asia Tenggara. United Nations menyebutkan dengan tingkat urbanisasi yang tinggi tentunya akan menimbulkan potensi-pontensi permasalahan di kota-kota besar Indonesia.

Pertumbuhan jumlah penduduk mengakibatkan peningkatan permasalahan yang timbul dalam kehidupan masyarakat (United Nation, 2014). Kota Bandung sebagai salah satu kota besar di Indonesia menghadapi permasalahan terkait pelayanan publik. Lebih lanjut Pikiran Rakyat menyebutkan bahwa Pemerintah Kota Bandung menghadapi 32000 penunggakan permintaan terkait Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dalam setahun yang belum terselesaikan dikarenakan pengerjaan yang menggunakan tenaga manual (Pikiran Rakyat ,2017).

Kemudian birokrasi yang rumit membuat masyarakat enggan melakukan proses perizinan secara langsung dan lebih memilih menggunakan penghubung atau *calo* (CNN Indonesia, 2017). Lebih lanjut CNN Indonesia, bahwa pegawai bersangkutan (pegawai negeri sipil) yang seharusnya melakukan proses perizinan di loket kantor namun dilakukan diluar kantor dengan sejumlah imbalan sehingga memungkinkan adanya penyimpangan. Sebagai contoh mayoritas para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Bandung enggan melakukan pengurusan izin usaha secara langsung dikarenakan rumitnya birokrasi. Akibatnya para pelaku usaha tersebut kehilangan kesempatan untuk mendapatkan dukungan pemerintah bahkan kesulitan untuk merambah pasar internasional (Pikiran Rakyat, 2017).

Permasalahan tersebut juga berbenturan dengan peraturan perundang-undangan. Ada beberapa azas yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam memberikan layanan publik, diantaranya adalah keprofesionalan, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan (Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik).

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu adanya sebuah solusi untuk melakukan perbaikan. Salah satu konsep yang digunakan untuk perbaikan itu yaitu

smart city (Wijaya, 2016). *Smart City* adalah sebuah konsep integrasi dari berbagai aspek dalam pemerintahan, manajemen, teknologi dan pengelolaan kota sebagai solusi dari permasalahan perkotaan (Frost dan Sullivan, 2014). Konsep *smart city* sangatlah luas, bergantung situasi dan kondisi masing-masing wilayah (Wijaya, 2016). Pengelolaan kota dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi tengah dilakukan oleh beberapa kota di Indonesia contohnya Jakarta, Surabaya dan Bandung (Kamil, 2014). Pertumbuhan penduduk yang akan semakin meningkat Kota Bandung membuat integrasi system yang ada di pemerintahan untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat (Techinasia,2016).

Singapura merupakan salah satu negara di dunia yang telah menerapkan konsep *smart city* dan masuk dalam peringkat teratas dunia negara dengan kinerja *smart city* terbaik (Global City Indeks, 2016). *Smart governance* merupakan fokus utama Singapura dalam penerapan *smart city* yang dinamakan *smart nation*. *Smart Nation* adalah pemanfaatan teknologi untuk layanan pemerintahan yang digunakan untuk melakukan pelayanan publik dengan melibatkan pelaku bisnis dan masyarakat (Singapore Department, 2016). Berikut ini beberapa kegiatan dan program yang telah diterapkan oleh Pemerintah Singapura dalam bidang *smart governance* :

1. Aplikasi *Sing Pass* yang disediakan oleh pemerintah yang memungkinkan masyarakat mengakses ratusan layanan digital yang disediakan oleh 60 instansi pemerintah.
2. Portal satu atap yang berisi kumpulan data dari 70 lembaga publik yang dapat diakses umum di data.gov.sg.
3. Aplikasi yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program *smart governance* seperti *OneService*.

Kota Bandung salah satu kota di Indonesia yang sedang menerapkan konsep *smart city* dengan salah satu dimensinya yaitu *smart governance* (Kamil, 2014). Penerapan *smart governance* ini demi mewujudkan tujuan kota yaitu dengan visi “Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera” dan misi “Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani” (Portal Bandung, 2017). Berikut ini beberapa program dan kegiatan terkait

penerapan *smart governance* yang telah dilakukan di Kota Bandung :

1. Peluncuran *website* resmi Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2015 yaitu Bandung.go.id dan portalbandung.go.id yang mengintegrasikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan informasi mengenai Kota Bandung serta dapat diakses publik.
2. Aplikasi yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan pemerintah terkait penerapan *smart governance* seperti *Lapor* yang diluncurkan pada tahun 2013.
3. Portal satu atap *OpenData Bandung* yang diluncurkan tahun 2014 sebagai sumber informasi publik

Sejak Diluncurkannya konsep Bandung *smart city* berbagai terobosan penggunaan teknologi aplikasi terus diluncurkan oleh Pemerintah Kota Bandung. Aplikasi yang dibuat tidak semua digunakan dengan maksimal dan berfungsi sebagaimana tujuan awal, menurut pengamat telekomunikasi dari ITB Ian Josef Matheus Edward tidak sedikit aplikasi berbasis teknologi informasi yang dikembangkan Pemerintah Kota Bandung tidak berjalan semestinya, dalam melakukan pendaftarannya tinggal klik-klik di daftar menu aplikasi tetapi ambil hasil dari berkas yang kita urus baru jadi dalam 10 hari (SINDONEWS,2017).

Pada tahun 2016, Kota Bandung memperoleh penghargaan sebagai Indonesia *Smart Nation Awards*, Indonesia *Best Smart City Awards* dan *Best Government Awards* dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Pikiran Rakyat, 2016). Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang diwujudkan dalam *smart governance* dilakukan dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat dan pemerintah. Perbaikan pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, reformasi birokrasi dan penghematan anggaran dapat tercapai demi kepentingan masyarakat serta terwujudnya visi misi kota yang berlandaskan peraturan yang berlaku (Kamil,2014).

Penelitian yang telah dilakukan oleh Indrawati, Febrianta dan Amani (2017) mengenai faktor-faktor dalam mengukur *smart governance* di Kota Bandung telah menghasilkan variabel dan indikator untuk mengukur parameter *smart governance*.

Namun belum ditemukan nilai indeks untuk mengukur kesiapan kota di Indonesia dalam penerapan *smart governance*, khususnya dimensi *smart governance*. Berdasarkan latar belakang, pencarian informasi dan studi literatur sebelumnya, perlu dilakukan penelitian untuk mendapatkan nilai indeks yang memiliki peranan dalam tata kelola pemerintahan pada kota di Indonesia, dengan mengangkat studi kasus penelitian ini adalah Kota Bandung.

Kota Bandung dipilih didasarkan kepada Tridharma Perguruan Tinggi yaitu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi). Sehingga penelitian ini dilakukan di Kota Bandung sebagai bentuk implementasi kewajiban tersebut.

1.3 Perumusan Masalah

Pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Bandung mengakibatkan peningkatan permasalahan yang timbul dalam kehidupan masyarakat, masalah di dalam pemerintahan yang terjadi pada latar belakang telah keluar dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik . Konsep *smart cityx* merupakan solusi atas permasalahan terkait tata pemerintahan seperti penumpukan perizinan dan birokrasi. Pemerintah Kota Bandung sedang terus menerapkan konsep *smart city*, terutama *smart governance* yang tercantum dalam rencana strategis daerah. Prioritas pelayanan publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi mewujudkan visi misi kota serta kesejahteraan umum.

Tetelah dilakukan literatur *review*, belum ditemukan hasil pengukuran penerapan program *smart governance*. Kajian literatur yang diperoleh terkait implementasi *smart governance* adalah penelitian yang telah dilakukan oleh Indrawati, Febrianta dan Amani (2017) yang menghasilkan variabel dan indikator untuk mengukur penerapan *smart governance* di Kota Bandung, dari penelitian tersebut belum diperoleh hasil nilai indeks di Kota Bandung.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, belum diperoleh nilai indeks *smart governance* di Kota Bandung, maka pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana data skunder dari *best practices* terkait variabel dan indikator indeks untuk mengukur tingkat kesiapan *smart governance*?
2. Bagaimana data sekunder dari Kota Bandung terkait variabel dan indikator indeks untuk mengukur tingkat kesiapan *smart governance*?
3. Bagaimana penilaian para nara sumber terkait variabel dan indikator indeks untuk mengukur tingkat kesiapan Kota Bandung terkait *smart governance* sesuai dengan apa yang dirasakan, data sekunder Kota Bandung dan *best practice*?
4. Berdasarkan indeks tersebut pada butir 3. bagaimana tingkat kesiapan Kota Bandung terkait penerapan *smart governance*?
5. Apa yang harus dilakukan stakeholder Bandung untuk merealisasikan Kota Bandung sebagai *smart city* ditinjau dari dimensi *smart governance*?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui data sekunder dari *best practices* terkait variabel dan indikator indeks untuk mengukur tingkat kesiapan *smart governance*
2. Untuk mengetahui data sekunder dari Kota Bandung terkait variabel dan indikator indeks untuk mengukur tingkat kesiapan *smart governance*?
3. Untuk mengetahui penilaian para nara sumber terkait variabel dan indikator indeks untuk mengukur tingkat kesiapan Kota Bandung terkait *smart governance* sesuai dengan apa yang dirasakan, data sekunder Kota Bandung dan *best practice*?
4. Untuk mengetahui indeks tersebut pada butir 3. bagaimana tingkat kesiapan Kota Bandung terkait penerapan *smart governance*.
5. Untuk mengetahui *stakeholder* Bandung untuk merealisasikan Kota Bandung sebagai *smart city* ditinjau dari variabel *smart governance*.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian mengenai variabel dan indikator penerapan smart energy dalam upaya mewujudkan konsep smart city di Kota Bandung ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktik.

1. Manfaat secara akademik
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi akademisi, memberikan pengetahuan dan pengalaman serta menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya yang bertemakan *smart city* khususnya *smart governance*.
 - b. Penelitian ini untuk memperkuat model variabel dan indikator penerapan *smart governance* dengan objek yang berbeda dengan penelitian sebelumnya saat pengujian teori tersebut dilakukan.
2. Manfaat secara Praktik
 1. Manfaat untuk Pemerintah Kota Bandung
 - a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan rekomendasi bagi Pemerintah Kota Bandung dan pemain bisnis terkait penerapan *smart governance*.
 - b. Memberikan masukan bagi pemerintah Kota Bandung dan kota-kota lainnya khususnya kepada stakeholder dalam mewujudkan pelayanan publik yang bagus serta meningkatkan *good governance*.
 2. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan berkaitan dengan implementasi dan evaluasi *Smart Governance* di kota lain yang sedang menerapkan *Smart Governance*..

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

Objek penelitian ini adalah nilai indeks untuk mengukur tingkat kesiapan Kota Bandung terkait penerapan *smart governance*. Sedangkan subjek penelitian ini adalah pemerintah Kota Bandung terkait penerapan *smart city* khususnya *smart governance*. Kemudian subjek penelitian selanjutnya adalah ahli dan peneliti bidang smart city khususnya *smart governance*, baik dosen, konsultan maupun

peneliti. Selanjutnya Pemerintahan Kota Bandung dan user terkait penerapan *smart governance*.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang akan dilakukan. Gambaran tersebut berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab. Maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan gambaran umum objek penelitian, latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang di pilih yang akan dijadikan dalam penulisan proposal tesis ini. Teori-teori tersebut dikutip dari beberapa literatur seperti buku teks, jurnal atau tesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini secara garis besar diuraikan mengenai metode yang akan digunakan untu penelitian ini yang meliputi rancangan penelitian, batasan penelitian, model analisis, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, instrumen penelitian, populasi sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, hasil analisis dan pengolahan data berserta pembahasannya, yang di sajikan secara sistematis sesuai dengan lingkup penelitian serta sesuai dengan tujuan penelitian

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang akan dilakukan dan disertai dengan rekomendasi atau saran.